



# **SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA)**

UNTUK

# **SATU DATA INDONESIA**

TAHUN 2020

Samarinda, 9 September 2020

# DASAR HUKUM

Amanat UU  
25/2004 dan UU  
23/2014

- Perencanaan Pembangunan Daerah Harus : Berbasis Data dan Informasi, Satu Kesatuan dalam Sistem Pembangunan Nasional, Terhubung dengan Informasi Pemerintahan Daerah, Menjadi Media Pembinaan Umum Pembangunan Daerah

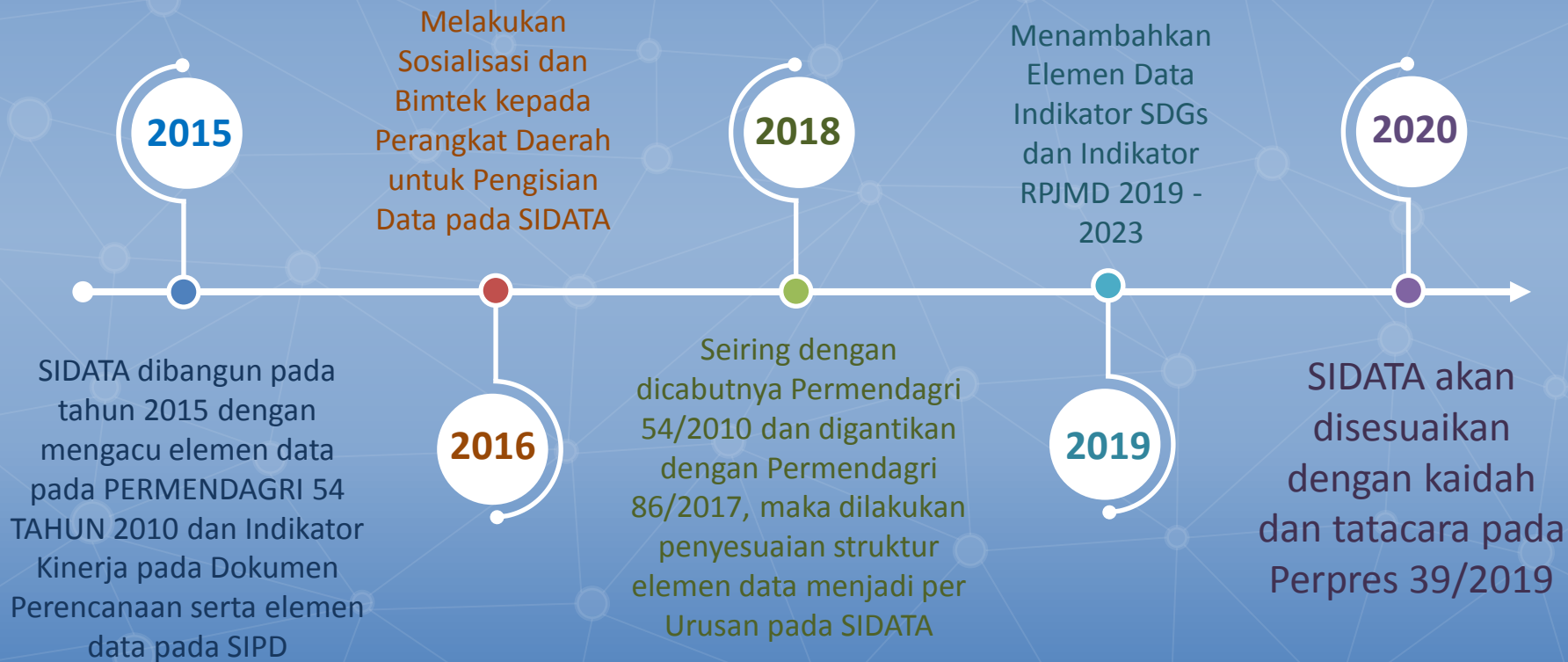
- Pasal 2(2b) Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah sebagai dasar Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- Pasal 2 (2c) Mendorong Keterbukaan dan Transparansi Data sehingga tercipta Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Pembangunan yang berbasis pada Data

PERPRES  
39/2019 Tentang  
SATU DATA  
INDONESIA

PERMENDAGRI 70/2019  
tentang SISTEM  
INFORMASI  
PEMERINTAHAN DAERAH

- Pasal 8 (1) Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik
- Pasal 8 (2) Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

# PERKEMBANGAN SIDATA



# TUJUAN SDI

Ketersediaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi

Acuan Pelaksanaan dan Pedoman Penyelenggaraan Tata Kelola Data

Mendorong Keterbukaan dan Transparansi Data

Mendukung Sistem Statistik Nasional

# TUJUAN SIDATA

Memberikan kemudahan dalam pelayanan informasi data dan informasi kepada pengguna baik dari institusi pemerintah maupun non pemerintah dalam dan luar daerah secara tepat waktu, handal, akurat dan konsisten serta mudah;

Meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan pentingnya data dan informasi;

Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan data yang mutakhir bagi pengambil keputusan di tingkat Daerah;

Meningkatkan kelancaran komunikasi data dan informasi antar Daerah; dan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

## Prinsip Satu Data Indonesia

### STANDAR DATA

(Standar yang mendasari data tertentu)

### METADATA

(Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, Menjelaskan Data serta Memudahkan Pencarian, Penggunaan dan Pengelolaan Informasi Data)

### INTEROPERABILITAS DATA

(Kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi)

### KODE REFERENSI

(Tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik)



Sejak awal dibangunnya SIDATA telah mengikuti Standar Data yang ada pada Permendagri 54/2010 kemudian direvisi menjadi Permendagri 86/2017. Saat ini SIDATA juga telah memuat Indikator SDGs pada Perpres 59/2017



Saat ini yang tersedia pada SIDATA yaitu Metadata untuk Indikator SDGs dan akan menyusul untuk elemen data yang lain



SIDATA telah memenuhi salah satu Kaidah interoperabilitas yaitu Data pada SIDATA disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik



Kode Referensi dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Apabila Kode Referensi telah tersedia maka akan segera diakomodir ke dalam SIDATA

## Implementasi Prinsip SDI ke SIDATA Kaltim

# PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA



## PENYELENGGARA SIDATA KALTIM

### PERENCANAAN DATA

- Melakukan penghapusan atau penambahan Data berdasarkan hasil Pemeriksaan Data Tahun Sebelumnya

### PENGUMPULAN DATA

- Data langsung diinput ke dalam aplikasi SIDATA otomatis langsung tersebarluaskan

### PEMERIKSAAN DATA

- Paling Lambat Minggu ke 2 bulan Desember diadakan Rapat Evaluasi/Klarifikasi/Validasi Data dengan Tim Pengolah SIDATA



# Implementasi **STANDAR DATA** di **SIDATA** terlihat seperti dibawah ini

Menampilkan Indikator Kinerja Per Urusan sesuai dengan Permendagri 86/2017

Elemen Data terdiri dari Permendagri 86/2017, Indikator SDGs dan Indikator lain untuk kebutuhan Perencanaan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- Urusan Wajib Pelayanan Dasar
- Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
- Urusan Pilihan
- Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Dinas Kesehatan

Sarana Kesehatan

Master Elemen Data

URAIAN	LEVEL	NO URUT	INDUK	AN	KEL.DATA
1. Jumlah Puskesmas	1	1		Unit	PERMENDAGRI
2. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1	2		Unit	PERMENDAGRI
3. Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta	1	3		Unit	PERMENDAGRI
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	1	2	%		SDGs
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	1	3	%		SDGs
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	1	4	%		SDGs
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan	1	5	%		SDGs

SIDATA - SISTEM INFORMASI DATA KALIMANTAN

1.01 Pendidikan

1.02 Kesehatan

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1.06 Sosial

Beranda Unit Pengentri Pencarian Definisi Operasional

Nilai PDRB Kaltim Atas Dasar Harga Berlaku

Data Provinsi Data Kab/K

2018

550.000.000

500.000.000

450.000.000

2014 2015 2016 2017 2018

# Implementasi METADATA di SIDATA terlihat seperti dibawah ini:

1.01 Pendidikan

1.02 Kesehatan

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Jmm Serta Perlindungan Masyarakat

1.06 Sosial

«

SIDATA - SISTEM INFORMASI DATA KALIMANTAN TIMUR

Selamat Datang, Administrator

Beranda

Unit Pengentri

Pencarian Data

Data Dasar

Edit Data

Edit Data Grafik

Metadata

Setting

Resume

Profil

Logout

Metadata » Halaman Metadata

NO.	URAIAN	SATUAN	METADATA / DEFINISI	METODE PERHITUNGAN	SUMBER / TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp	Imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang.	membagi upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerja aktual seminggu dikalikan dengan 4 (empat).	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	%	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.	Badan Pusat Statistik
3	a. Persentase setengah pengangguran	%			
4	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%	merupakan laki-laki dan perempuan yang berusia 15 – 24 tahun.	membagi jumlah akumulasi usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti tranning atau pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) dikali dengan 100 persen.	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
5	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan	segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Kementerian Ketenagakerjaan
6	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Fasilitasi TKLN	setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) berdasarkan okupasi.	Kementerian Ketenagakerjaan: Laporan administratif.
7	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	%	Layanan Keuangan merupakan bentuk layanan dari lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkannya pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria.	diperoleh dengan jumlah rekening kredit UMKM dibagi dengan jumlah total UMKM dikalikan dengan 100 persen.	1. Bank Indonesia; 2. Otoritas Jasa Keuangan; 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



# TINGKAT KETERISIAN SIDATA



# Evaluasi SIDATA Kaltim

Sejak dibangunnya Aplikasi Sidata di Tahun 2015 selalu dilakukan Evaluasi Keterisian Data yang telah diinput oleh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk mengetahui tingginya tingkat keterisian data tetapi juga untuk memvalidasi data yang diinput. Karena sebenarnya SIDATA tidak hanya fokus pada tingginya Keterisian Data melainkan kepada pemanfaatan data sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.

Pada slide berikutnya akan ditampilkan tingkat keterisian data seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal dengan kategori perwarnaan berdasarkan rentang persentase keterisian data.



No	Nama Unit Pengentri	Jumlah Elemen	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Jumlah Entri	Kurang Entri	Tingkat Keterisian (%)	Jumlah Entri	Kurang Entri	Tingkat Keterisian (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	237	150	87	63,29	29	208	19,33
2	Dinas Kesehatan	228	109	119	47,81	62	166	56,88
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	128	97	31	75,78	8	120	8,25
4	Dinas Perhubungan	65	65	0	100	65	0	100
5	Dinas Lingkungan Hidup	87	65	22	74,41	40	47	61,54
6	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125	54	71	43,20	0	125	0,00
7	Dinas Sosial	89	78	11	87,64	0	89	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	51	34	17	66,67	13	38	38,24
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	92	56	28	60,87	35	49	62,50
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	108	66	42	61,11	0	108	0,00
11	Dinas Pemuda dan Olah Raga	32	24	8	75,00	16	16	66,67
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30	26	4	86,67	16	14	61,54
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80	54	26	67,50	37	43	68,52
14	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	27	27	0	100,00	27	0	100,00
15	Badan Kepegawaian Daerah	127	127	0	100,00	123	4	96,85

No.	Nama Unit Pengentri	Jumlah Elemen	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Jumlah Entri	Kurang Entri	Tingkat Keterisian (%)	Jumlah Entri	Kurang Entri	Tingkat Keterisian (%)
16	Badan Pendapatan Daerah	78	77	1	98,72	77	1	98
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	51	48	3	86,27	45	6	50,98
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	31	30	1	67,74	30	1	98
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	45	43	2	95,56	0	45	0,00
20	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	212	150	62	68,87	12	200	5,66
21	Dinas Perkebunan	131	130	1	99,24	1	130	0,76
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	174	174	0	100,00	98	76	56,32
23	Dinas Kehutanan	61	47	14	77,05	10	51	16,39
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	67	41	26	56,72	33	34	0,00
25	Dinas Pariwisata	74	22	52	29,73	0	74	0,00
26	Dinas Kelautan Dan Perikanan	101	100	1	91,09	99	2	95
27	Badan Pusat Statistik	716	281	435	39,25	92	624	12,85
28	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	22	21	1	95,45	16	6	72,73
29	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	21	12	9	57,14	0	21	0,00
30	Biro Hukum	17	9	8	52,94	4	13	23,53

No.	Nama Unit Pengentri	Jumlah Elemen	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Jumlah Entri	Kurang Entri	Tingkat Keterisian (%)	Jumlah Entri	Kurang Entri	Tingkat Keterisian (%)
31	Satpol PP	18	18	0	100,00	18	0	100,00
32	Biro Organisasi	23	22	1	91,30	22	1	98
33	Kanwil Kementerian Agama	67	67	0	100,00	63	4	94,03
34	Biro Perekonomian	23	23	0	100,00	0	23	0,00
35	Kanwil KemenkumHAM	71	68	3	95,77	68	3	95,77
36	BMKG	42	42	0	100,00	42	0	100,00
37	Badan Pertanahan Nasional	48	0	48	0,00	0	48	0,00
38	Polda	122	118	4	96,72	98	24	80,33
39	PLN	15	15	0	100,00	15	0	100,00
40	Bank Indonesia	81	76	5	93,83	61	20	75,31
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	132	49	83	37,12	4	128	3,03
	J U M L A H	3.987	2.715	1.264	69	1.379	2.600	34,58

### Tingkat Keterisian Data s/d tanggal 9 September 2020 :

Tahun 2019 dari 3.987 elemen data sudah terisi 2.715 elemen data, belum terisi 1.264, sehingga tingkat keterisian data 2019 sebesar **69%** sedangkan untuk tahun 2020 Tingkat Keterisian hanya **34,58%**.

# PROSES KLARIFIKASI/VALIDASI DATA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	FORMAT KLARIFIKASI ELEMEN DATA PADA APLIKASI SIDATA KALTIM		KLARIFIKASI
	SUB KATEGORI/ELEMEN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	
1	Lingkungan Hidup (Plasma Nutfah Dilindungi)	Jumlah Hewan dan Tumbuhan Yang Dilindungi di Tahun 2019 meningkat sekitar 93% dibanding Tahun 2018 . Apa Faktor yang Membuat Plasma Nutfah yang dilindungi meningkat dengan pesat dalam kurun waktu 1 tahun?	
2	Luas Ruang Terbuka Hijau	Tahun 2014 Luas Ruang Terbuka Hijau : 6.445.266 Ha Menurun menjadi 102.505 Ha Tahun 2015. Setelah itu Luasannya sama sampai dengan tahun 2020 tidak ada pengurangan atau penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau. Apa Penyebab Luas Ruang Terbuka Hijau Menurun di tahun 2015 dan apakah benar luasannya tetap?	
3	Pemantauan Kualitas Udara (Karbon Monoksida (CO) dan Hidro Carbon(HC))	Tahun 2017 Data CO dan HC meningkat lebih dari 80% dari tahun 2016 dan Keterangan Tahun 2019 tidak dilakukan pemantauan pada CO dan HC. Apa Penyebab meningkatnya data di tahun 2017 dan penyebab tidak dilakukan pemantauan di tahun 2019?	
4	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Data tahun 2019 menurun dibanding tahun sebelumnya. Apa penyebabnya?	
5	Terumbu Karang	Tahun 2019 dan 2020 Tidak ada Terumbu Karang yang memiliki Kondisi Baik Sekali (75-100%). Apakah Benar dengan kondisi tersebut sekiranya apa penyebabnya?	
6	Hutan Bakau	Tahun 2019 dan 2020 tidak ada Hutan Bakau dalam kondisi Sedang sementara di Tahun 2018 ada datanya. Apakah Hutan Bakau Kondisi Sedang tahun 2018 beralih ke Kondisi Baik atau Rusak? Sementara Kondisi Rusak juga berkurang 43.964,56 Ha dan Kondisi Baik Hanya Bertambah 4.756,54 Ha. Apakah Hutan Bakau telah beralih Fungsi?	
7	Pengelolaan Sampah	Data Tahun 2019 dan 2020 Belum Terisi	
8	Perusahaan Wajib Dokumen Lingkungan	Tahun 2018 Persentase Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL tahun 2018 54,29% di tahun 2019 menjadi 100% akan tetapi Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib Dokumen Lingkungan (AMDAL) Menurun sebanyak 25 Perusahaan. Apakah Banyak Perusahaan yang Tutup di tahun 2019 Sehingga Jumlahnya Berkurang?	



# Jadwal Kegiatan SIDATA Tahun 2020

Kegiatan SIDATA		Januari s/d Maret	April s/d September	Oktober	November	Desember
1	Perencanaan Data					
2	Pengumpulan Data					
3	Pemeriksaan Data (Evaluasi/Validasi/Klarifikasi)					

- Bulan November Tim Bappeda akan melakukan Pemeriksaan Data dengan cara mengidentifikasi data yang telah diinput/dikumpulkan di SIDATA. Hasil Pemeriksaan Data akan dibagikan kepada Tim Pengolah SIDATA paling lambat Akhir November.
- Minggu Pertama Desember akan diadakan pertemuan dengan Tim Pengolah SIDATA untuk mendengarkan Klarifikasi dari tim terkait dengan Pemeriksaan Data.

# PENUTUP

01

Penerapan SDI perlu kolaborasi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal

02

SIDATA dalam pembangunan dan penerapannya diarahkan untuk mampu mendukung SPBE dan SDI

03

Perlu segera disusun petunjuk teknis penyusunan Standar Data, Metadata, Kode Referensi yang baku oleh Pembina Data untuk mempercepat penerapan SDI

04

Bappeda sebagai Sekretariat SDI tingkat Daerah berkomitmen untuk mendorong penerapan SDI di Prov Kalimantan Timur

“**TERIMA KASIH**”

**SEKRETARIAT SDI  
PROVINSI KALTIM**



**BAPPEDA PROV KALTIM**  
**Bidang P3D**  
**Subbid Data dan Informasi**

Email : [datisp3d.bappedakaltim@gmail.com](mailto:datisp3d.bappedakaltim@gmail.com)

Youtube : Bappeda Prov Kaltim

IG : [p3dbappedakaltim](#)

[sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id)



**SATU DATA  
INDONESIA**

